

Prof. Dr. Subardjo, SH., M.Hum.



HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Buku Ajar
Mahasiswa
Fakultas
Hukum



HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, SH., M.Hum



HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Penulis

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, SH., M.Hum

ISBN

978-602-60424-9-1

Editor

Tim Redaksi

Desain Cover

Tim Redaksi

Layouter

Tim Redaksi

Penerbit

CV. MARKUMI

Redaksi

Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta

Mobile. 08174 60004

Email: markumidotcom@yahoo.com

Web: markumi.com

Cetakan I, Desember 2016

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, sehinggabuku ajar yang berjudul "Hukum Pemerintahan Daerah" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam tak lupa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Bahan ajar ini berisi mengenai ketentuan-ketentuan pemerintah daerah, penataan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas dan wewenang kepala daerah, politik hukum otonomi di era reformasi dan demokrasi, hubungan pusat-daerah, dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam bahan ajar ini juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan atau soal yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atau memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disajikan. Dengan adanya buku ini besar harapan kami dapat dipergunakan mahasiswa Fakultas Hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Semoga bahan ajar ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi kita terkait dengan pemerintahan daerah. Masukan diharapkan untuk membuat bahan ajar ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat lebih luas di bidang ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,
Desember 2016

Penulis

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, SH., M.Hum | iii

DAFTAR ISI

Penggalan 1	: Ketentuan-ketentuan Umum Pemerintahan Daerah, Pembagian Wilayah Negara, Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	1
Penggalan 2	: Penataan Daerah, Pembentukan Daerah, Pemekaran Daerah, Penggabungan Daerah, Penyesuaian Daerah Kepentingan Strategis Nasional Dalam Pembentukan serta Desain Penataan Daerah	19
Penggalan 3	: Pengertian Pemerintah Daerah, Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Daerah Dalam Otonomi Daerah, dan Sumber-sumber Keuangan Daerah.....	25
Penggalan 4	: Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Kedudukan DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	36
Penggalan 5	: Politik Hukum Otonomi di Era Reformasi dan Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia	45
Penggalan 6	: Hubungan Pusat – Daerah, Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Produk Hukum Daerah.....	56
Penggalan 7	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut UU No : 5 Tahun 1974, UU No : 22 Tahun 1999, UU No : 32 Tahun 2004, UU No : 23 Tahun 2014.	65